

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang berisi informasi keuangan suatu perusahaan yang berdasarkan peristiwa yang terjadi. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, manajemen wajib menyajikan secara lengkap laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017)[1]. Pentingnya informasi yang disediakan oleh perusahaan bersumber dari seluruh kegiatan operasional perusahaan namun, dalam hal ini manajemen tidak memberikan informasi secara begitu saja, laporan keuangan harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan setiap pelaporan keuangan akan melalui tahapan akuntansi. Yaitu : kegiatan transaksi ekonomi, pencatatan transaksi, klasifikasi jenis transaksi, dan pelaporan (Financial Accounting, Weygandt, Kimmel, Kieso, 2015)[2].

Tahapan pelaporan keuangan merupakan tahap akhir dari mengolah data hingga menjadi informasi yang bersifat siap pakai. Adapun informasi tersebut berpengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh pengguna informasi dalam hal ini stakeholder. Keputusan stakeholder di pengaruhi dari informasi yang tersedia yaitu; informasi posisi keuangan suatu perusahaan sehingga dapat menilai kinerja perusahaan selama beberapa periode (Oktomegah, 2012)[3].

Dalam pelaporan keuangan perusahaan diberi kebebasan atau fleksibilitas untuk memilih metode akuntansi yang dianggap sesuai dengan kondisi perusahaan dan yang dapat mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak stabil, artinya perusahaan berhati-hati dalam penyusunan laporan keuangan. Tindakan kehati-hatian yang dilakukan oleh perusahaan ini disebut sebagai konservatisme akuntansi. Implikasi konsep konservatisme terhadap prinsip akuntansi yaitu akuntansi mengakui biaya atau rugi yang kemungkinan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar (Oktomegah, 2012)[3]. Prinsip konservatisme penting bagi seorang manajer untuk mengurangi sikap optimistik yang berlebihan, sehingga laporan keuangan memiliki asset yang *understatement* dan liabilitas yang *overstatement*, hal ini diakibatkan pengakuan pendapatan dan keuntungan

yang lebih lambat sedangkan pengakuan biaya dan kerugian lebih cepat (Noviantari dan Ratnadi, 2015)[4].

Namun seiring dengan pengadopsian *International Financial Reporting Standards* (IFRS) secara penuh pada tahun 2012 (dampak konvergensi IFRS terhadap bisnis, 2009) istilah konservatisme mulai digantikan dengan *prudence*. Prinsip *prudence* dalam IFRS adalah pengakuan pendapatan boleh diakui meskipun masih berupa potensi, sepanjang memenuhi ketentuan pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) namun tetap saja menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengakuannya. Setelah SAK mengadopsi IFRS, IASB mengatakan bahwa sebenarnya baik *prudence* atau konservatisme bukanlah kualitas informasi akuntansi yang diinginkan sehingga mereka menciptakan IFRS dengan harapan laporan keuangan dapat menjadi relevan dan andal. Hal yang dianggap baik untuk mengatasi ketidakpastian yang akan dialami oleh perusahaan adalah dengan menganut prinsip *prudence* akuntansi pada level yang tepat dalam laporan keuangan (Aristiani *et al.*, 2017)[5].

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang menggunakan konsep *prudence* adalah PSAK No. 14 tentang Persediaan dijelaskan bahwa persediaan dalam neraca disajikan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Kemudian ada PSAK No. 48 tentang Penurunan Nilai Aset yang menjelaskan bahwa penurunan nilai aset merupakan rugi yang harus segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Prinsip *prudence* akuntansi sampai saat ini masih dianggap sebagai prinsip yang kontroversial. Terdapat banyak kritikan yang muncul, namun ada pula yang mendukung penerapan prinsip ini. Laporan akuntansi yang dihasilkan dengan metode yang konservatif cenderung bias dan tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Kiryanto dan Supriyanto, 2006)[6]. Namun, ada juga pendapat yang mendukung penerapan metode ini. Penggunaan metode akuntansi yang konservatif bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak (Watts, 2003)[7].

Berikut perkembangan prinsip *prudence* akuntansi pada industry farmasi tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan prinsip *prudence* akuntansi pada industry farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.**

No.	Nama Perusahaan	<i>Prudence</i> Akuntansi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	DVLA	-0.019	-0.077	-0.023	-0.041	0.103
2	INAF	-0.118	-0.083	0.217	-0.126	0.026
3	KAEF	-0.016	0.023	0.015	0.053	0.015
4	KLBF	-0.015	-0.027	0.012	0.027	-0.015
5	MERK	-0.071	-0.028	-0.081	0.017	-0.104

Sumber : Bursa Efek Indonesia, Data diolah

Dapat dilihat dari tabel diatas, perusahaan Darya Varia Laboratoria Tbk (DVLA) pada tahun memiliki nilai yang negatif setiap tahunnya dan nilai terendah pada tahun 2015 yang mencapai -0.077 dan memiliki nilai positif pada tahun 2018. Pada perusahaan Indofarma (persero) Tbk (INAF) memiliki tingkat *prudence* yang besar pada tahun 2016 dengan nilai 0.217. Perusahaan Kimia Farma (persero) Tbk (KAEF) memiliki nilai *prudence* yang cukup baik pada tahun 2015-2018 karena memiliki nilai diatas 0. Pada perusahaan Kalbe Farma Tbk (KLBF) memiliki nilai *prudence* pada tahun 2016 dan 2017 dengan nilai positif diatas 0. Pada Merck Tbk (MERK) memiliki nilai negatif dari tahun 2014-2016, mengalami kenaikan nilai pada tahun 2017 dan menurun lagi pada tahun 2018.

Berdasarkan fenomena diatas dapat kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut kurang memperhatikan prinsip *prudence* akuntansi. Padahal prinsip kehati-hatian baik dalam pencatatan pendapatan maupun biaya serta keuntungan dan kerugian. Selain itu juga prinsip *prudence* akuntansi merupakan prinsip yang penting dalam pelaporan keuangan agar pengakuan dan pengukuran aktiva serta laba dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena aktivitas ekonomi dan bisnis di lingkup oleh suatu ketidakpastian (Fatmariyani, 2013)[8].

Prinsip *prudence* digunakan bila berhubungan dengan ketidakpastian dalam lingkungan dan kemungkinan optimisme berlebihan dari manajer dan pemilik (Belkoui, 2004)[9]. Motif pemilihan suatu metode akuntansi tidak terlepas dari *positive accounting theory* yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt covenant hypothesis*, dan *political cost hypothesis* (Watts & Zimmerman, 1986)[10]. Motif ini yang menjadi faktor dalam penerapan prinsip *prudence*.

*Bonus plan hypothesis* adalah perusahaan merencanakan bonus berdasarkan *net income*, maka perusahaan tersebut akan memilih prosedur akuntansi yang menggeser pelaporan *earning* masa datang ke periode sekarang. *Bonus plan hypothesis* berkaitan dengan tindakan manajemen dalam memilih metode akuntansi untuk memaksimalkan laba demi mendapatkan bonus yang tinggi. Masalah pemilihan metode akuntansi yang konservatif tidak terlepas dari kepentingan manajemen untuk memaksimalkan kepentingannya dengan mengorbankan kesejahteraan pemegang saham (Mayangsari & Wilopo, 2012)[11].

*Bonus plan hypothesis* diproksikan dengan kepemilikan manajerial karena dalam *positive accounting theory* menyatakan bahwa manajer akan bertindak seiring dengan bonus yang diberikan. Kepemilikan manajerial yang rendah akan menyebabkan laporan keuangan cenderung tidak konservatif, karena manajer akan lebih mengutamakan untuk mengejar bonus daripada mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan (Padmawati & Fachrurizie, 2015)[12]. Jika kepemilikan manajerial perusahaan lebih tinggi dari kepemilikan manajerial pihak eksternal, maka perusahaan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang *prudence* lalu keputusan dan aktivitas akan diselaraskan oleh kepentingan manajemen yang sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan tersebut (Alvian & Sabeni, 2013)[13]. Jika target laba perusahaan tercapai, maka bonus akan diberikan kepada manajemen perusahaan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan. Dengan begitu pelaporan perusahaan akan kurang konservatif dikarenakan manajemen laba yang mungkin dilakukan manajer perusahaan demi mendapatkan bonus.

*Bonus plan hypothesis* memiliki pengaruh terhadap *prudence* akuntansi yang berarti semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar bonus yang di dapat manajer. Sehingga perusahaan cenderung tidak konservatif dan manajer lebih menyukai metode akuntansi yang meningkatkan laba periode berjalan. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa semakin besar nilai kepemilikan manajerial maka akan semakin *prudence* suatu perusahaan.

Berikut data kepemilikan manajerial pada industry farmasi tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan struktur kepemilikan manajerial pada industry farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.**

No	Nama Perusahaan	Kepemilikan Manajerial				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	DVLA	0	0	0	0	0
2	INAF	0	0	0	0	0
3	KAEF	0.000022 5	0.000022 7	0.00002 7	0.00001 3	0.00001 3
4	KLBF	0	0	0	0	0
5	MERK	0	0	0	0	0

Sumber : Bursa Efek Indonesia, Data diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat perusahaan Darya Varia Laboratoria Tbk (DVLA), Indofarma (persero) Tbk (INAF), Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan Merck Tbk (MERK) tidak memiliki persentase kepemilikan manajerial baik berasal dari dewan direksi maupun dewan komisaris, hal ini menandakan bahwa perusahaan cenderung tidak *prudence* dalam pelaporan keuangan karena manajer dapat dengan mudah melakukan manajemen laba untuk mendapatkan bonus. Sedangkan perusahaan Kimia Farma (persero) Tbk (KAEF) memiliki persentase kepemilikan manajerial dengan tingkat yang rendah, menandakan bahwa adanya kemungkinan manajer yang sudah menerapkan prinsip *prudence* dalam perusahaan.

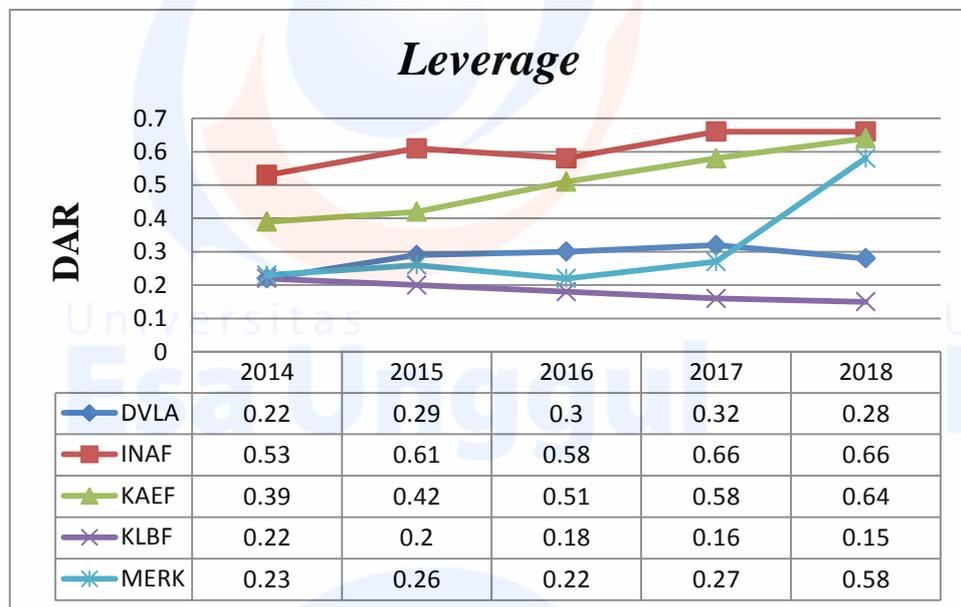
Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Reskino dan Vemiliyarni (2014)[14], menyatakan bahwa *bonus plan* tidak berpengaruh signifikan terhadap prinsip *prudence* akuntansi. Sedangkan hasil penelitian Mega Novita (2016)[15], menyatakan bahwa *bonus plan* berpengaruh positif secara signifikan terhadap prinsip *prudence* akuntansi.

*Debt covenant hyphotesis* adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Fatmarini, 2013)[8]. *Debt covenant hyphotesis* memprediksikan bahwa manajer ingin meningkatkan laba dan aktiva untuk mengurangi biaya renegotiasi kontrak hutang. Manajer perusahaan yang melakukan perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba. Hal ini menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal (Oktomegah, 2012)[3]. *Debt covenant hyphotesis* diprosikan dengan Rasio *leverage* diukur

menggunakan *debt to asset ratio* yang dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dan perbandingannya dengan total asset yang dimiliki perusahaan.

*Debt covenant* memiliki pengaruh signifikan terhadap *prudence* akuntansi yang berarti, semakin tinggi rasio hutang maka semakin besar kemungkinan manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi rasio hutang maka semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Semakin dekat batasan kredit maka semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan menggunakan metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa semakin tinggi nilai utang perusahaan maka perusahaan akan semakin tidak *prudence*.

Berikut perkembangan *Leverage (Debt to Asset Ratio)* pada industry farmasi tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : Bursa Efek Indonesia, Data diolah

**Gambar 1.1**

**Perkembangan *Leverage (DAR)* pada Industry Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.**

Dilihat dari grafik diatas, perusahaan Indofarma (persero) Tbk (INAF) memiliki nilai *debt to asset ratio* lebih dari 50% secara berturut-turut dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Sedangkan perusahaan Merck Tbk (MERK) memiliki nilai *debt to asset ratio* kurang dari 30% secara

berturut-turut dari tahun 2014 sampai tahun 2017 dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2018. Sementara perusahaan Kimia Farma (persero) Tbk (KAEF) memiliki nilai *debt to asset ratio* yang terus naik setiap tahun dari tahun 2014-2018. Perusahaan Kalbe Farma Tbk (KLBF) memiliki nilai yang berfluktuatif. Darya Varia Laboratoria Tbk (DVLA) memiliki nilai *debt to asset ratio* yang fluktuatifkurang dari 50% setiap tahunnya dari 2014-2018. Nilai *debt to asset ratio* menentukan seberapa besar asset perusahaan yang berasal dari hutang dan seberapa besar asset perusahaan yang berasal dari modal perusahaan. Semakin rendah nilai asset yang berasal dari hutang maka perusahaan mempunyai kemungkinan yang baik untuk melunasi semua kewajiban yang ada.

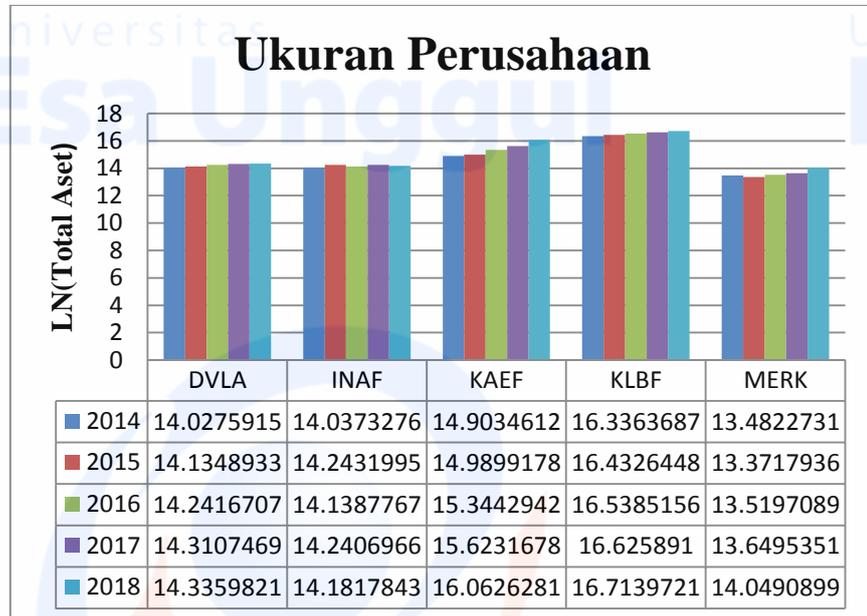
Menurut Raharjo (2016)[16], *debt covenant* yang diproksikan terhadap *leverage (Debt to Asset Ratio)* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prinsip *prudence*. Karena perusahaan dengan tingkat utang yang semakin tinggi akan menggunakan pilihan kebijakan akuntansi untuk memperbaiki rasio keuangan dan mengurangi kemungkinan pemutusan perijinan utang. Maka yang terjadi adalah perusahaan menyajikan laporan keuangan cenderung tidak konservatif. Menurut Fani Risdiyani (2015)[17], *debt covenant* memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip *prudence* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2011 – 2013.

*Political hypothesis* menyatakan bahwa konflik kepentingan antara perusahaan (manajer) dengan pemerintah sebagai kepanjangan tangan masyarakat yang memiliki wewenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku (peraturan perpajakan maupun peraturan lainnya) akan menimbulkan *political cost*. Hipotesis biaya politis memprediksikan bahwa manajer ingin mengecilkan laba untuk menimbulkan biaya politis yang potensial (Watts & Zimmerman, 1986)[10]. *Political cost* diproksikan dengan ukuran perusahaan yang merupakan suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi (Sholichah, 2015)[18]. Karena semakin besar ukuran perusahaan, maka peluang manajer untuk menerapkan prinsip *prudence* juga semakin besar.

*Political cost* yang diproksikan dengan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *prudence* akuntansi yang berarti perusahaan besar lebih sensitive daripada perusahaan kecil terkait dengan biaya politis (Watts & Zimmerman, 1990)[19]. Perusahaan besar cenderung melaporkan keuangannya secara konservatif untuk mengurangi biaya

politik dan manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat memperkecil laba perusahaan.

Berikut perkembangan ukuran perusahaan pada industry farmasi tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : Bursa Efek Indonesia, Data diolah

**Gambar 1.2**

**Perkembangan ukuran perusahaan pada Industry Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.**

Berdasarkan grafik diatas, perusahaan Darya Varia Laboratoria Tbk (DVLA) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun tidak terlalu signifikan. Pada perusahaan Indofarma (persero) Tbk (INAF) mengalami peningkatan dari tahun 2013-2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 tetapi meningkat kembali pada tahun 2017. Perusahaan Kimia Farma (persero) Tbk (KAEF) mengalami peningkatan secara berturut-turut dari tahun 2013-2017. Pada perusahaan Kalbe Farma Tbk (KLBF) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Merck Tbk (MERK) mengalami peningkatan yang tidak signifikan pada tahun 2013 dan 2014, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2016 dan 2017.

Hasil penelitian terdahulu untuk variabel ketiga yaitu *political cost*. Menurut Alif Aditya Darma Saputra (2018)[20], *political cost* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap prinsip *prudence* akuntansi. Sedangkan hasil penelitian Calvin Oktomegah (2012)[3], *political cost*

yang diproksikan terhadap ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap prinsip *prudence* akuntansi. Karena semakin besar ukuran perusahaan maka peluang manajer menggunakan kebijakan yang konservatif semakin besar. Hasil ini memberikan indikator bahwa kemungkinan terjadinya transfer kekayaan semakin besar dengan semakin besarnya total asset perusahaan.

Perusahaan yang dijadikan objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur Sub Sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena perusahaan manufaktur memiliki kegiatan operasional yang kompleks sehingga kemungkinan adanya risiko kesalahan pencatatan keuangan juga semakin besar, terlebih pada sub sektor farmasi pernah terjadi kasus melebihi laba yang dilakukan oleh manajemen yang disebabkan kurangnya penerapan prinsip *prudence* akuntansi. Oleh karena itu perusahaan perlu menerapkan prinsip *prudence* akuntansi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tidak menyesatkan.

Motivasi dalam penelitian ini adalah meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang prinsip *prudence* akuntansi pada perusahaan yang terdaftar di BEI, namun masih terjadi *research gap* yang menunjukkan adanya keanekaragaman dari hasil penelitian tentang beberapa faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi. Keanekaragaman hasil penelitian ini disebabkan karena adanya perbedaan dari sifat variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk memilih judul **“Pengaruh *Bonus Plan*, *Debt Covenant*, dan *Political Cost* terhadap prinsip *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2018”**.

## 1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingkat penerapan prinsip *prudence* yang rendah pada perusahaan menyebabkan kurangnya kepercayaan pihak eksternal terhadap informasi yang diberikan.
2. Tingkat *Bonus Plan* yang diukur dengan kepemilikan manajerial yang rendah dapat menyebabkan manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sesuai.

3. Tingginya tingkat *Debt Covenant* yang diukur dengan DAR pada perusahaan dapat menyebabkan rendahnya penerapan *prudence* akuntansi.
4. Tingkat *Political Cost* yang diukur dengan ukuran perusahaan yang rendah pada perusahaan menyebabkan rendahnya penerapan *prudence* akuntansi.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada :

1. Objek penelitian yang digunakan adalah industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Tahun penelitian yang dipilih adalah 5 tahun dari periode 2014-2018.
3. Variabel yang digunakan sebanyak 3 (tiga) variabel independen yaitu *bonus plan*, *debt covenant*, dan *political cost* serta 1 (satu) variabel dependen yaitu *prudence* akuntansi.
  - a. *Bonus Plan* diukur dengan menggunakan proksi kepemilikan manajerial yaitu jumlah saham beredar komisaris, direksi, manajer dibagi dengan jumlah saham beredar.
  - b. *Debt Covenant* diukur dengan menggunakan proksi *leverage* yaitu total hutang dibagi dengan total asset.
  - c. *Political Cost* diukur dengan menggunakan proksi ukuran perusahaan dari total asset.
  - d. *Prudence* akuntansi diukur dengan menggunakan proksi akrual yaitu *net income* dikurangi dengan arus kas operasi dan dibagi dengan total asset.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Bonus Plan*, *Debt Covenant*, dan *Political Cost* berpengaruh secara simultan terhadap prinsip *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2018?
2. Apakah *Bonus Plan* berpengaruh secara parsial terhadap prinsip *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2018?
3. Apakah *Debt Covenant* berpengaruh secara parsial terhadap prinsip *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2018?

4. Apakah *Political Cost* berpengaruh secara parsial terhadap prinsip *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2018?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Bonus Plan*, *Debt Covenant*, dan *Political Cost* secara simultan terhadap prinsip *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Bonus Plan* secara parsial terhadap prinsip *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Debt Covenant* secara parsial terhadap prinsip *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Political Cost* secara parsial terhadap prinsip *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2018.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi perusahaan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyajian laporan keuangan.
2. Bagi akademik  
Sebagai acuan penelitian berikutnya dengan topik sejenis yaitu pengaruh *Bonus Plan*, *Debt Covenant*, dan *Political Cost* terhadap prinsip *Prudence* Akuntansi pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Bagi pihak terkait  
Sebagai pertimbangan bagi investor agar mempertimbangkan pengaruh *Bonus Plan*, *Debt Covenant*, dan *Political Cost* terhadap prinsip *Prudence* Akuntansi, sehingga investor lebih berhati-hati dalam membaca laporan keuangan dan dapat memperoleh pengembalian investasi yang maksimal.